



## **ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA BUKIT TELAGA DAN GOA (BULAGA) DI DESA PUCAKWANGI KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN**

Mutiara Firrizqi<sup>1</sup>, Calvin Edo Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

### **Info Artikel**

#### **Sejarah Artikel:**

Diterima: 28 Juni 2025

Disetujui: 21 Juli 2025

Dipublikasikan: 15  
Oktober 2025

#### **Keywords:**

Community  
Participation;  
Tourism Village;  
Development

### **Abstrak**

Banyaknya wisata di Indonesia memiliki potensi untuk terus dikembangkan salah satunya Wisata Bukit Telaga dan Goa (BULAGA). Pengembangan wisata membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat terlibat secara langsung dalam proses kegiatan. Namun dalam pengembangan Wisata Bulaga masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti kurangnya promosi wisata dan keterbatasan biaya untuk melakukan pengembangan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Bukit, Telaga, dan Goa (BULAGA) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Bulaga tergolong cukup baik. Partisipasi masyarakat terindikasi berada pada tingkat memberikan dukungan untuk mengembangkan Wisata Bulaga. Namun meskipun berada pada level tertinggi, dalam pengembangannya Wisata Bulaga juga masih memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan promosi yang efektif guna menjadi wisata yang berkelanjutan.

## **ANALYSIS OF THE LEVEL OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF HILL, LAKE, AND CAVE TOURISM (BULAGA) IN PUCAKWANGI VILLAGE, BABAT DISTRICT, LAMONGAN REGENCY**

#### **Keywords:**

Community  
Participation;  
Tourism Village;  
Development

### **Abstract**

*The many tourist attractions in Indonesia have the potential to continue to be developed, one of which is Bukit Telaga and Goa Tourism (BULAGA). Tourism development requires active community involvement. Community participation in development can run well if the community is directly involved in the activity process. However, in the development of Bulaga Tourism, there are still several problems that occur such as the lack of tourism promotion and limited funds to carry out comprehensive development. This study aims to describe community participation in the development of hills, lake and cave*

(BULAGA) in Pucakwangi Village, Babat District, Lamongan Regency. The type of research used is descriptive qualitative. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation using purposive sampling techniques. The results of the study showed that community participation in the development of Bulaga Tourism was quite good. Community participation is indicated to be at the level of providing support to develop Bulaga Tourism. However, even though it is at the highest level, in its development Bulaga Tourism still requires collaboration with various parties and effective promotion in order to become sustainable tourism.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

---

Alamat korespondensi:

[rararizkia24@gmail.com](mailto:rararizkia24@gmail.com) [kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id](mailto:kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id)

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, didukung oleh keragaman budaya, etnis, serta keunikan lokal yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan internasional. Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, karena tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Wahab, 2003). Namun demikian, menurut Asmara, (2020) pengembangan pariwisata di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan dalam diversifikasi produk wisata, rendahnya kualitas pengelolaan destinasi, kurang optimalnya pelayanan wisata, minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pariwisata, serta strategi promosi yang belum efektif.

Berbagai permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat dalam menarik minat wisatawan serta menghambat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih memerlukan upaya pemberian yang berkelanjutan. Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui penyusunan kebijakan dan regulasi yang diarahkan untuk menciptakan manfaat yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif, kerugian, maupun beban biaya yang mungkin timbul.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam bidang seni, budaya, dan pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Lamongan memiliki daya tarik

yang bersumber dari kekayaan alam, objek wisata buatan, warisan budaya, serta situs-situs religi (DISPARBUD LAMONGAN, 2025). Dalam rangka mengakselerasi pengembangan sektor ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan menginisiasi pengembangan desa wisata melalui program unggulan yang dikenal dengan RAMASINTA (Gerakan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan dan Terpadu). Program tersebut dirancang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026, yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sinergi lintas sektor, termasuk pertanian, perdagangan, industri UMKM, dan pariwisata.

**Tabel Data Pengunjung Wisatawan Kabupaten Lamongan**

<b>Data Pengunjung Wisatawan Kabupaten Lamongan</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Wisman</b>	<b>Wisnus</b>	<b>Jumlah</b>
2021	28	1.641.160	1.641.188
2022	98	4.763.350	4.763.448
2023	541	4.807.240	4.807.781

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, 2021-2023

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sampai 2023 kunjungan wisatawan mengalami kenaikan yang signifikan. Keberhasilan pembangunan pariwisata sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat setempat terlibat dalam menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas destinasi wisata. Salah satu wilayah yang memiliki potensi wisata dan termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah Kecamatan Babat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033, Desa Pucakwangi yang terletak di Kecamatan Babat terdiri atas satu dusun dan berada pada ketinggian 105 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki objek wisata alam yang dikenal sebagai Wisata Bulaga, yang telah masuk dalam daftar lima desa wisata prioritas pengembangan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Wisata Bulaga memiliki potensi yang unik karena menggabungkan tiga elemen geografis sekaligus, bukit, telaga, dan goa dalam satu kawasan wisata, yang merupakan karakteristik langka dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya. Kawasan ini sering dimanfaatkan sebagai lokasi perkemahan dan memiliki sejumlah spot yang menarik

untuk dikembangkan lebih lanjut. Salah satu daya tarik utama adalah keberadaan Goa Bulaga yang dihuni oleh koloni kelelawar.

**Tabel Data Jumlah Pengunjung 5 Desa Wisata 2022 yang Didampingi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

<b>Data Jumlah Pengunjung 5 Desa Wisata 2022 yang Didampingi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan</b>		
<b>Objek Wisata</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Pantai Kutang	49.976	44.289
Pemandian Air Hangat Brumbung	47.147	31.377
Makam Sendangduwur	39.061	36.877
Taman Airlangga	3.155	11.553
Wisata Bulaga	25.603	8.416

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, 2023

Meskipun Wisata Bulaga memiliki beragam potensi alam dan daya tarik wisata, dalam pengembangannya menghadapi berbagai kendala yang menghambat kemajuan destinasi tersebut. Setelah diresmikan pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan mencapai angka yang cukup tinggi, yakni 25.603 orang. Namun, pada tahun berikutnya, antusiasme tersebut tidak berlanjut secara konsisten, terlihat dari penurunan signifikan jumlah pengunjung sebesar 67% menjadi hanya 8.416 orang pada tahun 2023. Penurunan ini menjadi indikator adanya hambatan dalam upaya pengembangan wisata yang berkelanjutan, serta menempatkan Wisata Bulaga sebagai salah satu destinasi dengan penurunan kunjungan paling tajam di antara lima desa wisata yang didampingi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau lebih lanjut peran kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan masyarakat lokal, khususnya terkait sejauh mana keterlibatan mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata.

Salah satu permasalahan yang menghambat perkembangan Wisata Bulaga adalah keterbatasan fasilitas pendukung, sebagaimana diungkapkan dalam laporan reses anggota DPRD Jawa Timur dapil Lamongan-Gresik, Drs. MH Rofiq, di Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa wisatawan dan pengelola mengeluhkan minimnya sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK), belum optimalnya promosi wisata, serta kondisi objek wisata yang kurang terawat. Selain itu, akses jalan menuju kawasan wisata juga masih sempit dan sebagian berupa jalan makadam, sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah untuk perbaikannya (DPRD JATIM, 2022). Dalam konteks Wisata Bulaga yang masih berada

pada tahap pengembangan, keterlibatan aktif masyarakat setempat sangat diperlukan agar pengelolaan pariwisata dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Masyarakat sebagai pemilik sekaligus pelaku utama dalam pemanfaatan potensi lokal memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan aset pariwisata yang ada. Keterlibatan tersebut tidak hanya mendorong munculnya rasa memiliki terhadap destinasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal serta penguatan kapasitas kelembagaan desa (Jamilah et al., 2024). Dalam mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata, penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Wilcox (1994) dalam bukunya berjudul *"The Guide to Effective Participation"* menjelaskan bahwa partisipasi sebagai suatu tingkatan masyarakat dalam keterlibatan proses pembangunan. Teori ini mengklasifikasikan partisipasi ke dalam lima tingkatan, yakni: (1) memberikan informasi (*information*), yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan; (2) konsultasi (*consultation*), yaitu melibatkan masyarakat untuk memberikan tanggapan dan pendapat; (3) pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), yaitu proses di mana masyarakat dan pihak terkait bersama-sama menentukan langkah strategis; (4) bertindak bersama (*acting together*), yakni pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif antara masyarakat dan pemangku kepentingan; serta (5) memberikan dukungan (*supporting*), yaitu ketika masyarakat secara aktif mendukung dan menjalankan kegiatan yang telah dirancang. Pendekatan ini memberikan kerangka analitis yang sistematis untuk memahami bentuk, intensitas, dan efektivitas partisipasi masyarakat dalam konteks pengembangan destinasi wisata lokal seperti Wisata Bulaga.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Revi Titah Mhaura, Sri Kamariyah (2024) mengenai pengembangan Wisata Bulaga sebagai alat pemberdayaan masyarakat di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama Wisata Bulaga terletak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini ditunjukkan oleh masih minimnya kesadaran masyarakat Desa Pucakwangi terhadap potensi wisata yang dimiliki, serta kurangnya pemahaman mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Bulaga perlu didasarkan pada kajian yang komprehensif agar proses pengembangannya dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Wisata Bulaga sendiri merupakan salah

satu desa wisata di Kabupaten Lamongan yang memiliki keunikan geografis, yaitu keberadaan tiga elemen wisata, bukit, telaga, dan goa dalam satu kawasan, yang menjadikan memiliki nilai strategis tinggi untuk dikembangkan. Mengingat pengelolaan potensi tersebut belum mencapai tahap optimal, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Bulaga, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran masyarakat dalam mendorong kemajuan destinasi wisata tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019), penelitian kualitatif merupakan penelitian *naturalistic* karena penelitian yang dilakukan bersifat alamiah. Dengan menggunakan metode ini sehingga penulis dapat menganalisis terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Bulaga di Desa Pucakwangi. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan sumber data penelitian, dengan menganggap narasumber sebagai informan yang mengetahui masalah tersebut sehingga data yang di peroleh menghasilkan data yang berkualitas. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman (Miles et al., 2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu menurut (Sugiyono, 2019) untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yakni meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*), dan uji obyektivitas (*confirmability*). Penulis menggunakan uji kredibilitas triangulasi karena metode ini efektif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara data yang diperoleh dari wawancara dengan informan satu dengan lainnya. Sehingga pada hasil akhir dapat ditarik kesimpulan yang valid dan data bersifat kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Bulaga menggunakan teori Wilcox (1994) yang memiliki lima indikator yakni memberikan informasi (*information*), konsultasi (*consultation*), pengambilan keputusan (*deciding together*), bertindak bersama (*acting together*), memberikan dukungan (*supporting*). Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah

dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan menguraikan temuan-temuan yang ada di lapangan sebagai berikut:

**a. Memberikan informasi (*information*)**

Menurut Wilcox (1994) memberikan informasi merupakan tingkatan awal dalam partisipasi masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat belum terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tetapi menyampaikan informasi yang dapat mempengaruhi arah pengembangan suatu program. Informasi yang diberikan dapat berupa gagasan, kritik, atau harapan terhadap pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata (Setiajati et al., 2024).

Dalam konteks pengembangan Wisata Bulaga, masyarakat Desa Pucakwangi menunjukkan partisipasi aktif pada tahap ini. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat telah menyampaikan berbagai masukan yang disampaikan melalui jalur informal seperti pertemuan langsung, obrolan santai, maupun musyawarah desa. Sekretaris Desa Pucakwangi, Bapak Kristanto, menyampaikan bahwa masyarakat sering menyampaikan gagasan secara langsung, “*Banyak kok masyarakat yang pengen ini dikelola lagi biar ramai, masyarakat juga mau potensinya agar dikembangkan*” (Wawancara, 13 Mei 2025).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur BUMDesa Puncak Jaya, Bapak Ali, yang menyatakan bahwa, “*Sudah banyak masyarakat yang pengen Bulaga ini dihidupkan kembali, biar rame seperti dulu dan nggak terbengkalai seperti sekarang*” (Wawancara, 13 Mei 2025). Masukan yang disampaikan masyarakat meliputi usulan pembangunan gapura dan logo wisata, pengeboran ulang sumber mata air yang mengering, serta penataan ulang fasilitas penunjang. Seorang pelaku UMKM, Ibu Susanti, menambahkan bahwa, “*Kalau Bulaga ini dikembangkan lagi, dampaknya baik ke UMKM, makin ramai kalau pengunjungnya banyak*” (Wawancara, 13 Mei 2025).

Media penyampaian informasi yang dominan digunakan oleh masyarakat adalah secara lisan atau mulut ke mulut. Hal ini sesuai dengan penelitian Afriaji (2024), yang menyebutkan bahwa informasi dalam konteks partisipasi dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, bergantung pada struktur sosial dan akses komunikasi masyarakat. Ketua POKDARWIS, Bapak Abdul Wachit, menjelaskan,

*“terkait penyampaian proses pengembangan bulaga itu memang selalu di sisipkan ketika ada acara musyawarah desa. Na musyawarah desa itu kan ada pemerintah desa, ada BPD, ada ketua RT/RW dan perwakilan tokoh masyarakat*

*itu kami sampaikan, kami sisipkan. Sudah beberapa kali mbak dalam pertemuan saya sampaikan, jadi andai bulaga ini jadi tempat wisata sungguhan itu kami sudah bisa menggambarkan betapa besar pemasukan Desa Pucakwangi khususnya untuk umkm, la itu sudah pernah terbukti di waktu 2012-2013.”* (Wawancara, 13 Mei 2025).

Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata lokal serta kesadaran akan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Fadillah et al. (2025), partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau gagasan menjadi modal sosial penting dalam strategi pengembangan wisata karena masyarakatlah yang paling memahami kondisi dan potensi lokal.

Meski demikian, informasi yang diberikan masyarakat belum sepenuhnya ditindaklanjuti karena terkendala oleh keterbatasan anggaran. Pemerintah desa menerima informasi tersebut secara terbuka, tetapi pengembangan Wisata Bulaga masih mengandalkan pendanaan dari dana desa yang terbatas, sehingga hanya dapat dilakukan secara bertahap. Namun, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi tetap menjadi fondasi awal dalam menciptakan komunikasi dua arah antara warga dan pengelola wisata.

### **b. Konsultasi (*consultation*)**

Konsultasi merupakan tingkat kedua dalam partisipasi masyarakat, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi terkait pengembangan suatu program. Meskipun bersifat dua arah, tahap ini tidak menjamin seluruh aspirasi akan dilaksanakan. Dalam pengembangan Wisata Bulaga, praktik konsultasi telah dilakukan meskipun cenderung informal dan bersifat santai. Sekretaris Desa Pucakwangi, Bapak Kristanto, menjelaskan, “*Konsultasi ini sifatnya santai, agar alur pengembangan wisata ini juga jelas, apalagi yang harus pertama dibangun dan dikembangkan*” (Wawancara, 13 Mei 2025). Konsultasi ini mencakup diskusi dengan masyarakat dan pelaku usaha lokal, serta melakukan perbandingan pengembangan wisata dengan Ketua POKDARWIS dari Wisata Sendang Duwur.

Beberapa aspirasi utama masyarakat yang muncul dalam proses ini adalah permintaan pengeboran ulang sumber air yang telah mengering, perbaikan pendopo dan mushola, penambahan MCK untuk menunjang kegiatan seperti perkemahan, serta fasilitas promosi dan kios untuk UMKM. Sebagaimana

di disampaikan oleh Bapak Usman, “*Kalau ini airnya mati, ya kita pengennya dilakukan pengeboran... pendopo ini juga diperbaiki, mushola juga dirawat, dan buat MCK lagi*” (Wawancara, 13 Mei 2025). Selain itu, Ibu Nindi juga menyoroti pentingnya promosi digital dan fasilitas pendukung lainnya, “*Promosi juga sepertinya masih kurang... kalau bisa juga dibuatkan spot foto biar lebih menarik pengunjung*” (Wawancara, 13 Mei 2025).

Konsultasi juga menjadi sarana pengumpulan saran yang relevan dari pelaku UMKM. Ibu Susanti, yang berjualan di area Bulaga, mengungkapkan, “*Kebutuhan masyarakat kalau bisa ramai dikembangkan lagi... kemarin ada sharing kecil-kecilan dari kabupaten, saya diajak*” (Wawancara, 13 Mei 2025). Hal ini menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya menyuarakan kebutuhan, tetapi juga bersedia terlibat dalam diskusi pembangunan secara langsung.

Temuan ini sejalan dengan Herawati (2025) yang menyatakan bahwa forum konsultatif, seperti musyawarah desa, berperan penting dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat sehingga arah pengembangan pariwisata lebih responsif. Konsultasi di Desa Pucakwangi telah mendorong penyusunan rekomendasi pengembangan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat, seperti dijelaskan oleh Ketua POKDARWIS, Bapak Abdul Wachid,

*“disini sudah pernah dilakukan konsultasi juga langsung dengan warga melakukan konsultasi tanya jawab, kita juga sudah pernah waktu itu malah mendatangkan, mendatangkan apa ya tutorial dari sendang duwur, ketua Pokdarwis sendang duwur waktu itu sempat di datangkan disini, warga juga menghendaki agar pembangunan yang dilakukan segera terwujud. Dari adanya itu tadi mba konsultasi muncul lah rekomendasi pengembangan Bulaga yang kira-kira apa saja yang bisa kami lakukan.”* Wawancara, 13 Mei 2025).

Meskipun aspirasi masyarakat telah diterima dengan baik, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam realisasi keseluruhan usulan. Pemerintah desa menyambut baik partisipasi warga dan menetapkan beberapa prioritas berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana. Seperti diungkapkan oleh Bapak Kristanto,

*“kami sangat senang jika masyarakat punya kemauan untuk mengembangkan Bulaga, dari desa juga sudah menentukan apa saja yang harus di prioritaskan untuk pengembangan.”* (Wawancara, 13 Mei 2025).

Adanya respons positif dari pemerintah desa terhadap usulan yang disampaikan, meskipun belum seluruhnya terealisasi, menunjukkan bentuk awal dari responsivitas

pemerintah lokal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Pratiwi et al., (2023) yang menegaskan bahwa respon pemerintah yang terbuka terhadap aspirasi publik mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan demikian, proses konsultasi dalam pengembangan Wisata Bulaga telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan ide-ide strategis. Selain itu, adanya forum diskusi terbuka antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi modal penting untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif dan berkelanjutan di masa mendatang.

### c. Pengambilan Keputusan (*deciding together*)

Pada level ini, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi turut dilibatkan dalam proses perencanaan dan penetapan arah pengembangan program secara aktif. Partisipasi pada tingkat ini memungkinkan masyarakat memberikan gagasan dan terlibat langsung dalam proses penyusunan keputusan, sehingga mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.

Dalam konteks pengembangan Wisata Bulaga, masyarakat telah terlibat dalam forum pengambilan keputusan yang difasilitasi melalui musyawarah desa (musdes). Sekretaris Desa Pucakwangi, Bapak Kristanto, menegaskan bahwa keputusan seperti pembangunan gapura dan perbaikan pendopo merupakan hasil kesepakatan dalam forum musdes tahunan saat penyusunan APBDes.

*“saat pengambilan keputusan ada forumnya, ya biasanya kalau musdes saat penyusuanan APBDes na tiap tahun itu kan ada jumlah ditetapkan atau prosentase, na itu harus ada yang dialokasikan kesana. Na kalau tahun ini kan bikin gapura sama pendopo itu di bagus kan lagi pengembangannya na itu kemarin di rapatkan di musydes kan.”* (Wawancara, 13 Mei 2025).

Keterlibatan ini mencakup berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, RT/RW, POKDARWIS, dan pengurus BUM Desa. Bapak Ali, Direktur BUM Desa Puncak Jaya, menyatakan, *“Pengambilan keputusan ya kita tetap tumpung apa kebutuhan masyarakat, lalu dianalisis, disepakati, baru dilaksanakan.”* (Wawancara, 13 Mei 2025). Partisipasi masyarakat juga bersifat substansial, bukan sekadar simbolik. Ketua POKDARWIS, Bapak Abdul Wachid, menekankan bahwa *“semua ini berangkat dari masukan masyarakat, jadi ya tetap utamanya masyarakat”* (Wawancara, 13 Mei 2025). Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dari musyawarah ini antara lain pembangunan gapura, perluasan area bumi perkemahan,

dan rencana pengeboran sumber air yang kini mengering. Permasalahan air menjadi sorotan utama karena berkaitan langsung dengan daya tarik alam Bulaga, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman, “*Kalau airnya mati ya harus pengeboran, MCK juga perlu ditambah kalau ada kegiatan kemah*” (Wawancara, 13 Mei 2025).

Walaupun partisipasi masyarakat sangat aktif, pelaksanaan keputusan bersifat bertahap karena terkendala dana. “*Sudah disepakati tapi kita lakukan secara berkala, karena kita terkendala biaya,*” ujar Bapak Kristanto (Wawancara, 13 Mei 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Jepril et al., (2025) bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemetaan kebutuhan dan pengambilan keputusan akan meningkatkan relevansi dan keberhasilan program pengembangan wisata. Meskipun tidak semua warga diundang secara langsung dalam forum pengambilan keputusan, keterwakilan dilakukan melalui RT/RW, tokoh masyarakat, dan pengurus kelembagaan desa. Ibu Nindi menyampaikan bahwa “*kalau rapat biasanya hanya perwakilan saja, mungkin RT/RW*” (Wawancara, 13 Mei 2025).

Dengan demikian, pengambilan keputusan bersama dalam pengembangan Wisata Bulaga telah menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat. Keputusan yang diambil melalui musyawarah tidak hanya mencerminkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat setempat.

#### d. Bertindak Bersama (*action together*)

Tingkat bertindak bersama merupakan fase partisipasi masyarakat yang lebih aktif, di mana warga tidak hanya terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga membentuk kemitraan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan. Menurut Wilcox (1994) menyatakan bahwa pada tahap ini masyarakat menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kesepakatan.

Dalam pengembangan Wisata Bulaga, masyarakat Desa Pucakwangi telah membangun kemitraan dengan beberapa aktor lokal, seperti pemerintah desa, BUM Desa, Pokdarwis, Karang Taruna, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Sekretaris Desa Pucakwangi, Bapak Kristanto, menjelaskan:

“*Untuk kemitraan sendiri sementara pengembangannya masih dengan pihak desa, Pokdarwis, BUMDesa, sama Karang Taruna... Kalau swasta masih belum untuk saat ini.*” (Wawancara, 13 Mei 2025).

Ketiadaan kemitraan dengan sektor swasta disebabkan oleh rendahnya daya tarik investasi pasca-pandemi. Namun, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pengembangan kembali wisata ini. *"Masyarakat banyak yang antusias karena dulu sempat ramai, tapi karena COVID itu dampaknya sampai sekarang,"* ujar Bapak Ali, Direktur BUM Desa (Wawancara, 13 Mei 2025).

Partisipasi nyata warga terlihat dalam bentuk gotong royong dan kolaborasi lintas kelompok lokal. Ketua Pokdarwis, Bapak Abdul Wachid, menuturkan bahwa kegiatan seperti kerja bakti rutin dilakukan bersama warga dan pengelola desa: *"Kalau ada event atau kegiatan itu kan tetap ada kolaborasi... saling gotong royong, bantu-membantu."* (Wawancara, 13 Mei 2025).

Koordinasi antarpemangku kepentingan berlangsung secara sistematis. Pemerintah desa mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan anggaran melalui forum resmi, sementara BUM Desa memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. *"Desa sudah menganggarkan biaya BUMDesa memastikan pembangunan terlaksana sesuai rencana,"* jelas Bapak Kristanto dan Bapak Ali (Wawancara, 13 Mei 2025).

Selain itu, Pokdarwis berperan sebagai penghubung antara pihak desa dan masyarakat. *"Kami menjalankan arahan dari pihak desa... karena kami yang terjun langsung,"* tegas Bapak Abdul Wachid (Wawancara, 13 Mei 2025). Kegiatan ekonomi lokal seperti UMKM juga didukung melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas. *"Biasanya dari pihak desa ada pelatihan UMKM, kami dibantu bikin kios,"* kata Ibu Susanti, pelaku UMKM di area wisata (Wawancara, 13 Mei 2025).

Aspek tanggung jawab bersama menjadi kunci penting dalam tahap ini. Pemerintah desa juga bertanggung jawab pada aspek infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas umum. Sementara masyarakat berperan menjaga kebersihan dan keamanan area wisata. *"Tanggung jawab saya ya ikut menjaga karena sudah tidak ditarik untuk berjualan, jadi saling menjaga saja,"* ungkap Ibu Susanti (Wawancara, 13 Mei 2025), yang juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Usman: *"Saya hanya ikut berpartisipasi, ikut menjaga juga."* (Wawancara, 13 Mei 2025). Dalam konteks ini, koordinasi antar aktor lokal dalam pengembangan Wisata Bulaga telah berjalan efektif, meskipun keterlibatan pihak swasta belum optimal. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan and Sihombing (2022) bahwa koordinasi yang baik antarorganisasi akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan pariwisata.

Dengan demikian, tahap bertindak bersama dalam pengembangan Wisata Bulaga menunjukkan adanya komitmen dan koordinasi yang kuat antara masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah desa. Meskipun keterbatasan masih ada, terutama pada sisi pendanaan dan kolaborasi eksternal, peran aktif warga dalam pelaksanaan kegiatan membuktikan bahwa pembangunan berbasis partisipasi dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

#### e. Memberikan Dukungan (*supporting*)

Pada tingkat tertinggi partisipasi yakni memberikan dukungan (*supporting*), masyarakat menunjukkan komitmen kolektif melalui kontribusi nyata dalam bentuk tenaga, waktu, dan dukungan moral terhadap pengembangan wisata. Menurut Wilcox (1994) menjelaskan bahwa pada tahap ini masyarakat memberikan bantuan baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pucakwangi telah menunjukkan partisipasi aktif melalui kerja bakti rutin, bantuan pembangunan fisik, dan dukungan terhadap kegiatan wisata, meskipun belum sampai pada kontribusi dalam bentuk dana. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa, Bapak Kristanto,

*“Biasanya kalau satu minggu sekali juga ada kegiatan kerja bakti untuk membersihkan area sekitar Bulaga... Perbaikan pendopo sudah dilakukan, dan sekarang sedang membangun gapura agar masyarakat tahu yang mana Bulaga itu.”* (Wawancara, 13 Mei 2025).

Kontribusi warga juga terlihat dalam pembangunan fasilitas seperti kios UMKM dan spot foto yang dikerjakan secara gotong royong. *“Kalau ada warga pengen berjualan yang buat kios-nya itu ya masyarakat yang bantu,”* ungkap Bapak Icuk sebagai anggota Pokdarwis (Wawancara, 13 Mei 2025).

Dukungan juga tampak dari peran warga dalam menyambut pengunjung dan memfasilitasi kegiatan di lokasi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Susanti, pelaku UMKM: *“Kalau ada yang tanya soal kemah, biasanya saya bantu arahkan dan laporan ke Pak Wachit... karena saya yang sering di sini dari pagi sampai sore.”* (Wawancara, 13 Mei 2025). Hal ini mencerminkan peran informal masyarakat dalam mendukung operasional wisata.

Dukungan moral dan sosial juga diungkapkan oleh warga seperti Bu Nindi yang menyatakan, *“Biasanya saya cerita-cerita ke teman saya biar orang tahu kalau di*

*Pucakwangi ada wisata alam... Kalau ada kerja bakti saya juga biasanya kasih minuman atau makanan untuk yang ikut.*" (Wawancara, 13 Mei 2025). Demikian pula Bapak Usman menambahkan, "*Saya sering menunjukkan arah ke pengunjung yang bingung cari Bulaga... juga ikut kerja bakti.*" (Wawancara, 13 Mei 2025).

Partisipasi ini penting tidak hanya dalam aspek teknis pembangunan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan wisata. Hal ini sesuai dengan temuan Helminah & Hasaruddin (2022) bahwa kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga dapat memperkuat keberhasilan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

Namun, dari sisi dukungan finansial, belum ditemukan kontribusi langsung dari masyarakat. Pendanaan masih sepenuhnya bersumber dari dana desa dan pemasukan internal seperti tarif parkir serta penyewaan lahan perkemahan. Direktur BUM Desa menyampaikan bahwa "*yang kerja ya masyarakat sini sendiri... itu termasuk kontribusi masyarakat juga, walaupun belum berupa dana.*" (Wawancara, 13 Mei 2025). Ketiadaan bantuan dana dari Dinas Pariwisata juga menjadi hambatan tersendiri dalam perluasan pengembangan.

Menurut Ismatullah dan Mahendra (2021) menyatakan bahwa kurangnya dukungan dana menjadi faktor pembatas dalam optimalisasi potensi wisata. Hal ini terlihat jelas dalam konteks Wisata Bulaga, yang hingga kini pengembangannya masih dilakukan secara bertahap dengan sumber daya terbatas. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat Desa Pucakwangi dalam tahap memberikan dukungan telah menunjukkan bentuk nyata keterlibatan sosial dan moral. Meskipun dukungan finansial belum tersedia, kontribusi dan keaktifan warga dalam menyumbangkan tenaga, waktu, serta ide telah membentuk fondasi sosial yang kuat untuk pengembangan Wisata Bulaga secara berkelanjutan dan berbasis komunitas.

## PENUTUP

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Bulaga menunjukkan hasil yang cukup baik dan telah mencapai level tertinggi dalam kerangka partisipasi Wilcox, yakni *memberikan dukungan (supporting)*. Keterlibatan masyarakat terlihat dalam berbagai tahap, mulai dari pemberian informasi mengenai potensi dan kebutuhan wisata, hingga keterlibatan aktif dalam forum konsultasi yang membahas berbagai usulan pengembangan, seperti pengeboran ulang sumber mata air, pembangunan spot foto, pendirian gapura wisata, dan perbaikan pendopo. Tahap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan juga dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat,

pemerintah desa, dan BUMDes, meskipun kolaborasi tersebut masih terbatas pada aktor internal dan belum melibatkan pihak eksternal seperti sektor swasta. Selain itu, masyarakat turut memberikan dukungan nyata melalui kontribusi tenaga dan waktu dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas wisata, meskipun belum ada partisipasi dalam bentuk dukungan finansial.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengembangan Wisata Bulaga. Pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat dan Pokdarwis guna memperkuat kapasitas dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata secara profesional. Kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk sektor swasta, juga perlu dijajaki agar dapat memperluas jejaring pendukung dan memperkuat daya saing wisata lokal. Selain itu, upaya promosi oleh Pokdarwis dan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif perlu diperkuat agar Wisata Bulaga dapat dikenal secara lebih luas, menarik kunjungan wisatawan, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat Desa Pucakwangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, S. (2020). *Tinjauan kritis kendala dan dampak pengembangan pariwisata Indonesia*. Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia sebagai Negara Maju: Pra dan Pasca Covid-19, 3, 140–151.  
<http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/40565>
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. (2023). *Kunjungan wisata Lamongan*. <https://disparbud.lamongankab.go.id/dokumen-publik>
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. (2025). *Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan*.  
<https://disparbud.lamongankab.go.id/profil/tentang-kami>
- DPRD Provinsi Jawa Timur. (2022). *Desa Wisata Bulaga Puncakwangi Babat perlu uluran tangan provinsi*. <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/11836/desa-wisata-bulaga-puncakwangi-babat-perlu-uluran-tangan-provinsi>

- Fadillah, N., Murdana, I. M., & Abdullah, A. (2025). *Pengembangan daya tarik wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Aik Bukaq Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah*. *Journal of Responsible Tourism*, 4(3), 173–178.
- Ismatullah, & Mahendra, G. K. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019*. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.556>
- Jamilah, W. N., Ruchendi, H., & Aulia, S. (2024). *Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang*. *The World of Public Administration Journal*, 6(1), 34–46. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1.2050>
- Jepri, Melo, R. H., Pambudi, M. R., & Asrul. (2025). *Kajian geospasial untuk pengembangan fasilitas pendukung destinasi wisata di Gorontalo: Literatur review*. *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner*, 2(2), 362–368. <https://doi.org/10.37905/irpi.v2i2.31498>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
- Nainggolan, C. D., & Sihombing, T. (2022). *Koordinasi pengembangan pariwisata Pantai Paris sebagai potensi wisata di Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun*. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 443–450.
- Nur Pratiwi, O., Nahruddin, Z., Nur Aina, A., & Arifin, I. (2023). *Responsivitas pemerintah melalui elektronik government (e-gov) di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(1), 61–81. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i1.2255>
- Revi, T. M., & Kamariyah, S. R. (2024). *Analisis SWOT pengembangan Desa Wisata Bulaga sebagai alat pemberdayaan masyarakat di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan*. *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya*, 2(2), 365–378.

Setiajati, W. B., Novaria, R., & Murti, I. (2024). *Partisipasi masyarakat terhadap penggunaan Suroboyo Bus sebagai sarana transportasi di Surabaya (Studi kasus Suroboyo Bus rute Purabaya–Rajawali)*. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4(1), 139–161.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

Wahab, S. (2003). *Manajemen kepariwisataan*. Pradya Paramita.

Wilcox, D. (1994). *The guide to effective participation*.